

PERANAN KESATUAN AKSI MAHASISWA INDONESIA DALAM PERGOLAKAN POLITIK INDONESIA (1965-1970)

THE ROLES OF THE INDONESIAN STUDENTS' ACTION FRONT IN POLITICAL UPHEAVAL IN INDONESIA (1965-1970)

Oleh: Tyas Nur Rissam dan Dr. Aman, M.Pd

rieztya12782@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mengetahui latar belakang berdirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), (2) mengetahui peranan KAMI dalam pergolakan politik Indonesia, (3) mengetahui dampak KAMI dalam pergolakan politik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan menggunakan metode menurut Kuntowijoyo. Langkah-langkah penelitian sejarah terdiri dari: (1) pemilihan topik, (2) heuristik, (3) verifikasi, (4) interpretasi, (5) historiografi. Hasil Penelitian ini menunjukkan tiga hasil. Pertama, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia merupakan organisasi *ekstra-universiter* yang dibentuk untuk melawan PKI. Kedua, Peranan KAMI dalam upayanya menghadapi pergolakan politik dimulai awal tahun 1966. KAMI telah mencetuskan Tri Tuntan Rakyat yang berisi tuntutan bubarkan PKI, retooling Kabinet Dwikora, serta turunkan harga kebutuhan dan memelopori berbagai demonstrasi untuk menyampaikannya. Permasalahan ekonomi yang memburuk mendorong KAMI mengadakan Pekan Ceramah. ketiga, dampak KAMI dalam pergolakan politik telah dirasakan. Tritura mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar, dilanjutkan pembubaran PKI. Tuntutan retooling kabinet telah mengikis pendukung Soekarno. Masuknya KAMI ke ranah konstitusional berhasil menurunkan jabatan Presiden Soekarno. Konsepsi hasil Pekan Ceramah digunakan sebagai landasan untuk mengeluarkan ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966.

Kata Kunci: Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Politik.

ABSTRAC

This study was aimed at determining: (1) the background of the establishment of Indonesian Students' Action Front (ISAF), (2) the roles of ISAF in political upheaval in Indonesia, and (3) the impacts of ISAF on political upheaval in Indonesia. This research used historical method according to Kuntowijoyo which is consist of five steps. The first steps is to determine the topic of research, the second step is to collect sources, the third step is the source verification, the fourth step is interpretation, and the last step is historiography. The results show that: (1) ISAF was an extra-university organization established to fight against the Indonesian Communist Party (ICP). (2) The roles of ISAF in its efforts to deal with political upheaval began in early 1966. ISAF launched the Three Demands of the People which contained demands for the dissolution of ICP, retooling of the Dwikora (Two Commands of the People) Cabinet, and a decrease in the price of necessities, and pioneered various demonstrations to state the demands. The worsening economic problems also encouraged ISAF to hold the Lecture Week. (3) The impacts of ISAF in political upheaval were apparent. The Three Demands of the People encouraged President Soekarno to issue Supersemar (the Decree of 11th March), followed by the dissolution of ICP. The demand of cabinet retooling eroded Soekarno's supporters. ISAF entered the constitutional realm and succeeded in reducing the position of President Soekarno. The conception of the results of the Lecture Week was used as a basis for issuing MPRS Decree No. XXIII/MPRS/1966.

Keywords: *Indonesian Students' Action Front (ISAF), Politics*

I. Pendahuluan

KAMI merupakan organisasi *ekstra universiter* yang dibentuk atas prakarsa Menteri PTIP, Brigjen Sjarif Thayeb. Tujuan dari KAMI adalah untuk mengamalkan dan mengamankan Pancasila; anti Nekolim; dan membantu ABRI untuk melawan Gerakan 30 September serta mendukung Presiden Soekarno.

Berdirinya KAMI tidak terlepas dari situasi nasional akibat Gerakan 30 September. Pihak-pihak yang tidak menyukai PKI membentuk wadah perjuangan untuk melawannya. Namun seiring berjalannya waktu, pada akhir 1965 perekonomian kian memburuk. Hal ini mendorong KAMI untuk ikut serta menyuarakan penderitaan rakyat. Untuk itu KAMI mengadakan rapat. Hasilnya, KAMI menempuh jalan Konsepsional dan Aksi Masa melalui demonstrasi. Demonstrasi digelar sekitar 2 bulan. Tuntutan KAMI yang terkenal, Tritura telah mematangkan situasi kearah pergantian kekuasaan, hingga dikeluarkan Supersemar. Keberadaan KAMI sebagai ujung tombak mahasiswa begitu dirasakan peranannya dalam situasi politik Indonesia saat itu.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengantahap-tahap

yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.¹

1. Pemilihan Topik

Pemilihan topik merupakan kegiatan memilih permasalahan yang akan diteliti. Topik dipilih berdasarkan berbagai pertimbangan yang dapat memperlancar penelitian. Topik dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual² penulis sehingga dapat menghasilkan tulisan yang baik. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang peranan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dalam pergolakan politik Indonesia (1965-1970).

2. Pengumpulan Sumber (Heuristik)

Pengumpulan sumber-sumber sejarah atau Heuristik harus sesuai dengan obyek kajian penelitian. Sumber-sumber yang didapat harus sesuai dengan sejarah yang akan ditulis. Pengumpulan sumber dalam penelitian ini antara lain diperoleh di Perpustakaan FIS UNY, Perpustakaan UNY, Perpustakaan Monjali, BPAD DIY, dan lain-lain.

¹Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Benteng Pustaka, 1995). hlm. 90.

²*Ibid*, hlm. 91.

3. Verifikasi (kritik sumber)

Kritik sumber menurut Louis Gottschalk³ merupakan kerja intelektual dan rasional yang mengikuti metodologi sejarah guna mendapatkan objektivitas suatu kejadian. Verifikasi data terdiri dari dua macam, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik eksternal adalah usaha mendapatkan otentitas sumber dengan melakukan penelitian fisik terhadap suatu sumber. Kritik internal menekankan aspek “dalam” yaitu isi sumber atau kesaksian yang dapat diandalkan atau tidak. Kritik kedalam mengacu pada isi dokumen yang dapat dipercaya atau tidak, tidak dimanipulasi, mengandung bias, maupun dikecohkan.

4. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran merupakan proses menganalisis satu persatu peristiwa dan kemudian disimpulkan, sehingga tanpa penafsiran sejarawan, data tidak bisa berbicara. Interpretasi terdiri dari analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan peristiwa sejarah menjadi sebuah cerita yang diuraikan secara kronologis. Sintesis berarti menyatukan berbagai fakta yang diperoleh melalui analisis untuk kemudian disimpulkan.⁴

5. Historiografi

Tahap terakhir dalam penelitian sejarah adalah penulisan peristiwa sejarah, dimana aspek kronologi sangat penting. Penulisan angka tahun yang runtut akan menghasilkan analisis yang kronologis. Dalam penyajian penelitian dalam bentuk tulisan terdiri dari tiga bagian yaitu pengantar yang mengemukakan permasalahan, latar belakang, historiografi, pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian, teori dan konsep yang dipakai, dan sumber-sumber sejarah. Selanjutnya hasil penelitian diuraikan disertai dengan data yang mendukung.

III. Pembahasan

Apabila kita berbicara mengenai peranan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, maka tidak dapat dipisahkan dari masa Demokrasi Terpimpin. Masa Demokrasi Terpimpin telah dimanfaatkan PKI. Cap sebagai anti Nasakom diberikan PKI untuk memukul mundur lawan-lawannya. PKI juga menilai kelompok-kelompok yang tidak dapat menerima gagasan Nasakom sebagai kontra revolusi dan harus ditekan. Salah satunya, HMI mendapatkan tekanan yang dilakukan kelompok PKI melalui CGMI dalam wadah PPMI.

Keikutsertaan Partai Masyumi dalam pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) selalu

³ Suhartono W. Pranoto. *Teori dan Metodologi Sejarah*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010). hlm. 35.

⁴ *Ibid*, hlm 101-104.

dikaitkan dengan HMI karena dianggap sebagai *onderbouwnya* yang menyebabkan organisasi islam terbesar ini diskors dari tubuh PPMI.⁵ Sejak saat itu, PPMI terpecah dalam tiga kelompok yaitu mereka yang prokomunis seperti CGMI, nasionalis seperti GMNI (terkadang juga proCGMI), serta proPancasila seperti PMKRI yang didukung oleh Somal dan GMD. Tak jarang pada setiap rapatnya suara yang timbul selalu terpecah dan tidak bisa mendapatkan keputusan.⁶ Kuatnya Tekanan dalam forum PPMI membuat beberapa anggotanya, terutama dari golongan proPancasila seperti PMKRI menjalin hubungan dengan berbagai pihak yang antikomunis seperti HMI dan militer.

Meletusnya Gerakan 30 September 1965 menjadi momentum bagi pihak pro Pancasila untuk membentuk wadah perjuangan baru dalam melawan PKI. Atas prakarsa menteri PTIP saat itu, Brigjen

ember (anggota penuh) IUS.*Ibid*, hlm. 55-57. Syarif Thayib dilaksanakan pertemuan di kediamannya, Jl. Imam Bonjol 26 Jakarta

Pertemuan pada 25 Oktober 1965 mempertemukan organisasi Mahasiswa seperti PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), SOMAL (Sekretariat Bersama Organisasi Mahasiswa Lokal) yang terdiri dari CSB, MMB, GMS, IMADA dan IMABA, GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), Mapancas (Mahasiswa Pancasila), SEMMI (Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia), Germahi, GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), Pelmasi (Pelopor Mahasiswa Sosialis Indonesia), IPMI (Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) dan Gerakan Mahasiswa Djakarta.⁷ Hasilnya, dibentuklah wadah perjuangan bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia.

Pemimpin KAMI terdiri dari 4 orang, masing-masing perwakilan dari organisasi yang berafiliasi dengan partai politik, yaitu PMKRI, GMNI, PMII, dan Mapancas. Namun, setelah pihak GMNI melalui pimpinannya, Bambang Kusnohadi menolak, akhirnya Presidium KAMI pusat tanpa perwakilan GMNI.⁸

⁵ Cosmas Batubara. *Cosmas Batubara, Sebuah Otobiografi Politik*. (Jakarta: Kompas, 2007). hlm. 37.

⁶Salah satu rapatnya yang membahas keanggotaan PPMI di dalam IUS (international Union of Students) terpecah dalam dua pandangan yang saling berlawanan. CGMI menginginkan agar PPMI menjadi anggota IUS secara penuh untuk mendukung revolusi, antiimperialisme dan antikapitalisme. Sementara beberapa organisasi seperti PMKRI dengan lantang menolaknya karena sebagai Negara yang bebeas aktif, Indonesia tidak boleh memihak kepada Blok Barat maupun Blok Timur. Desakan CGMI membuat Cosmas Batubara dan Pontas Nasution mengeluarkan minderheids nota yang menyatakan tidak setuju dengan keputusan PPMI yang masuk sebagai full

⁷*Ibid*.

⁸Achmad Suhawi. *Gymnastik Politik Nasionalis Radikal Fluktuasi Gerakan Mahasiswa*

Muhammad Zamroni dari PMII dipilih menjadi Ketua Periodik yang pertama. Setelah itu, jabatan Ketua Periodik yang kedua dipercayakan kepada Cosmas Batubara (PMKRI). Jajaran Presidium ditempati oleh tokoh-tokoh mahasiswa seperti David Napitupulu (Mapancas), Eljas (Somal), Nazaruddin Nasution (HMI), Johny Simanjuntak (GMKI), Mar'ie Muhammad (HMI), Slamet Sukirnantono (IMM), tokoh pers mahasiswa, Ismid Hadad, Hakim Simamora (Gemsos) dan lain-lain.⁹

Kemerosotan ekonomi yang semakin memburuk sejak dikeluarkannya Penetapan Presiden No. 27 tahun 1965 mengharuskan KAMI untuk ikut serta mencari jalan keluar sehingga KAMI pada tanggal 3 Januari 1966 mengambil inisiatif.¹⁰ Jalur konseptual ditempuh yaitu dengan menyelenggarakan Pekan Ceramah dan Seminar soal-soal Ekonomi dan Keuangan yang berlangsung 10-20 Januari 1966 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.¹¹ Seminar ini diselenggarakan atas kerjasama Universitas Indonesia, KAMI Pusat yang

diwakili oleh Muhammad Zamroni dan KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia). Seminar mengambil tema "Trace Baru" yang artinya jalan baru atau cara baru yang harus ditempuh untuk membangun ekonomi, politik, sosial, hukum dan pertahanan di masa depan.¹²

Jalur aksi masa ditempuh dengan demonstrasi besar dan mengajukan tuntutan kepada Presiden Soekarno yang akan dilaksanakan pada 10 Januari 1966. Pada 9 Januari 1966 Presidium KAMI Pusat mengadakan rapat di sekretariatnya, di Jalan Sam Ratulangi No.1.¹³

Rapat berhasil memperoleh kesepakatan untuk mengajukan beberapa tuntutan kepada Presiden Soekarno. Tiga orang dari KAMI Pusat ditunjuk sebagai Tim perumus yang bertugas menyusun Deklarasi Mahasiswa Indonesia yang akan disampaikan pada saat demonstrasi tersebut. Tim yang ditunjuk terdiri dari 3 orang, yaitu Nazar E. Nasution, Ismid Hadad, dan Savrinus Suardi. Masing-masing perwakilan dari PB HMI, Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) pada KAMI pusat, dan Sekjen PMKRI. Tim berhasil merumuskan tiga hal pokok yang kemudian dikenal dengan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat yang isinya: (1)

Nasional Indonesia. (Jakarta: Rajawali Press, 2009). hlm. 147-148.

⁹*Ibid*, hlm. 93.

¹⁰Kata Pengantar Ketua Panitia Pekan Ceramah dan Seminar KAMI Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. KAMI Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 1984 (cet. 2). *Jalur Baru Sesudah Runtuhnya Ekonomi Terpimpin (The Leader, The Man and The Gun)*. Jakarta: Sinar Harapan. hlm. 15.

¹¹*Ibid*, hlm. 11.

¹²Cosmas batubara, *op. cit.* hlm. 10-11.

¹³*Ibid*, hlm. 8.

Bubarkan PKI, (2) Rombak Kabinet, (3) Turunkan Harga.¹⁴

Demonstrasi KAMI yang terkenal dengan Tritura telah mendorong pengembal Supersemar mengambil tindakan untuk mengeluarkan Keputusan Presiden No.1/3/1966 tentang pembubaran PKI dari pusat hingga daerah.

Kabinet Dwikora yang dipimpin Presiden Soekarno dianggap tidak berhasil dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Atas pertimbangan tersebut, mahasiswa kemudian mengeluarkan Pernyataan tertanggal 16 Maret 1966 yang disampaikan kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPR-GR. Pernyataan tersebut berisi tuntutan kepada pemerintah agar segera menindak sejumlah menteri yang dinilai tidak bersih dari oknum-oknum PKI. Maka dikeluarkan pengumuman pada 18 maret 1966. Berdasarkan pengumuman tersebut, sebanyak 15 Menteri Kabinet Dwikora ditangkap dan ditahan. Kemudian disusul dengan penangkapan terhadap tokoh-tokoh pemuda, mahasiswa, wartawan, guru, tenaga pengajar di perguruan tinggi dan mereka yang berindikasi Gerakan 30 September.¹⁵

Kebijakan ekonomi di masa Orde Lama diperbaharui melalui ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tentang pembaruan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Proses dikeluarkannya ketetapan tersebut tidak terlepas dari lobi KAMI terhadap MPRS. KAMI juga memperjuangkan konsep tentang ekonomi yang diperoleh dari konsepsi ekan cermaha KAMI serta Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), di samping langsung dari Pak Emil Salim, agar menjadi Tap MPRS. Perjuangan ini berhasil dengan keluarnya ketetapan tersebut.¹⁶

KAMI telah menandai sebuah era perjuangan baru yang disadari oleh Jenderal Dr. A.H. Nasution. Kepada Presidium KAMI, ia mengusulkan untuk memakai nama Angkatan 66 untuk menandakan suatu kebangkitan nasional yang baru setelah Angkatan 08, 28 dan 45.¹⁷ Bergabung pula KASI (Sarjana), KAGI (Guru), KAPNI (Perusahaan Nasional), dan KABI (Buruh) serta orang-orang dari partai, ormas dan yang non partai dalam Angkatan 66.

Keputusan pengamanan terhadap beberapa nama menteri Kabinet Dwikora menimbulkan amarah Presiden.

¹⁴ M. Alfian Alfian: *HMI 1963-1966, Menegakkan Pancasila di Tengah Prahara*. (Jakarta: Kompas, 2013). hlm. 185-186.

¹⁵ Martha G-Ahmaddani. *Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. (Jakarta: Sinar Bahagia, 1985). hlm. 399.

¹⁶ Cosmas Batubara, *op. cit.* hlm. 131.

¹⁷ Parakitri Tahi Simbolon. Prisma, Desember 1977. "Di Balik Mitos Angkatan 66". Dalam Farchan Bulkin (Ed). *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES. hlm. 154.

Berhembus isu bahwa Supersemar akan dicabut. Sebelum itu terjadi, generasi muda melakukan berbagai kegiatan seperti seminar agar Supersemar disahkan dan diberikan kekuatan hukum oleh MPRS.¹⁸ Berbagai koreksi maupun tuntutan Angkatan 66 oleh Pengemban Supersemaar disalurkan secara demokratis konstitusional kepada MPRS selaku pemangku kedaulatan rakyat.

Sidang Umum ke-IV MPRS yang berlangsung di Jakarta tanggal 20 Juni - 6 Juli 1966 membahas berbagai persoalan yang pokok diantaranya mengakhiri penyelewengan, mengembalikan revolusi kepada relnya UUD 1945, menyalurkan perjuangan rakyat ke lembaga-lembaga konstitusional seperti DPR dan MPRS. Untuk itu, MPRS meninjau kembali Ketetapan-ketetapan MPRS yang bertentangan dengan UUD 1945. Tercatat sebanyak 32 macam keputusan dan memorandum berhasil dikeluarkan dalam sidang ini.¹⁹

Pidato Presiden yang berjudul Nawaksara di depan Sidang Umum ke-IV

¹⁸Kegiatan-kegiatan diarahkan untuk melahirkan konsepsi pembangunan politik, ekonomi, social dan budaya. April 1966 KASI Jaya di UI mengadakan seminar tentang UUD 1945 kemudian Seminar Pers. Di Bandung, seminar Angkatan Darat yang membahas pengertian Orde Baru. Martha. *op. cit.* hlm. 399.

¹⁹Ke 32 macam keputusan tersebut lebih lengkap diuraikan dalam Nasution, A.H. *Dari Kup 1 Oktober 1965 ke Sidang Istimewa MPRS 1967. 1975.* Tidak dicantumkan kota dan penerbit. hlm. 49-50.

MPRS pada 22 Juni 1966 sebagai bentuk pertanggungjawabannya ternyata belum menjawab sebab-sebab terjadinya Gerakan 30 Septemberserta epilognya, kemerosotan ekonomi dan akhlak bangsa. Sehingga MPRS dengan Keputusan MPRS No.5/MPRS/66 tanggal 5 Juli 1966 meminta Presiden agar melengkapi laporan tersebut. Kemudian mengeluarkan Nota 2/Pimp/MPRS/1966 yang ditujukan kepada Presiden perihal melengkapi laporan pertanggungjawaban sesuai Keputusan MPRS No.5/MPRS/66.

KAMI mengeluarkan pernyataan untuk menuntut kepada yang berwenang sesuai UUD 1945 untuk segera mengadili Ir. Soekarno yang disusul dengan menyampaikan fakta-fakta politis mengenai keterlibatan Prsiden Soekarno kepada Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung.²⁰ Eksponen KAMI se Jawa mengadakan pertemuan di Lembang, Bandung tanggal 9-12 Desember 1966 lalu mengeluarkan sebuah pernyataan yang menuntut kepada pihak yang berwenang untuk segera mengadili Soekarno. Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi) dan Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) juga tak luput dari tuntutan yang sama. Melalui “Deklarasi Keadilan dan Kebenaran” tanggal 16 Desember 1966 bahkan menuntut agar Presiden Sokarno

²⁰*Ibid.* hlm. 405-406.

dipecat dengan tidak hormat kemudian diadakan pemeriksaan sesuai hukum. Sedangkan KAMI, KAPPI, KAWI, KASI dan KAMI Jaya, KAGI Jaya dan Laskar Ampera Arief Rachman Hakim pada tanggal 20 Desember 1966 menyampaikan fakta-fakta politis keterlibatan Presiden Soekarno dalam Gerakan 30 September kepada Ketua Mahkamah Agung.²¹

Akhirnya Presiden Soekarno melengkapi Pidato Nawaksara melalui suratnya No.10/Pres/67 tanggal 10 Januari 1967.pada intinya penolakan Presiden untuk menyampaikan pertanggungjawaban secara cabang kepada MPRS. Hal ini menimbulkan reaksi penolakan dan tuntutan pemberhentian Bung Karno dari Presiden dan diadili.²²

DPRGR mengeluarkan resolusi bernama “Resolusi DPRGR 9 Februari” yang isinya meminta kepada pimpinan MPRS menyelenggarakan Sidang Istimewa MPRS selambat-lambatnya Maret 1967 untuk memberhentikan Presiden Soekarno kemudian memilih/mengangkat Pejabat Presiden serta memerintahkan kepada Badan Kehakiman untuk melakukan pengusutan, pemeriksaan dan penutupan secara hukum. Hal ini mendapat tanggapan MPRS setelah melakukan Sidang Badan Pekerja ke-3 tanggal 14-16 Februari 1967 dengan

keputusan menolak Pel-Nawaksara dan menyelenggarakan Sidang Istimewa MPRS pada 7-12 Maret 1967 dengan agenda Resolusi dan memorandum DPRGR tanggal 9 Februari 1967.²³

Mahasiswa juga melakukan aksi masa menuntut pemecatan Soekarno. Pada tanggal 7 Februari 1967 Presiden Soekarno mengirim surat kepada Jenderal Soeharto yang pada intinya menugaskan kepada pemegang Supersemar untuk memegang pimpinan pemerintahan sehari-hari disamping Presiden. Hal ini menandakan bahwa Presiden mempertahankan dualisme dalam pemerintahan yang selama ini dianggap sebagai hambatan dalam mensukseskan program Kabinet Ampera.²⁴

Sebagai tindak lanjut atas surat tersebut, diisenggarakan Rapat Panglima keempat Angkatan pada 8 february 1967. Hasil rapat memutuskan untuk menolak isi surat Presiden. Presiden yang mengetahui hal ini menyadari bahwa kedudukannya sudah tidak seperti dulu lagi. Ia memutuskan untuk menerima konsep

²³*Ibid*, hlm. 408-409.

²⁴Kabinet Ampera tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan lancar karena dualism diantara pengemban Supersemar yang tidak berkuasa secara penuh dengan Presiden Soekarno yang secara konstitusional masih berkuasa.Berbagai kebijaksanaan yang diambil tidak dapat berjalan karena perbedaan pendapat diantara keduanya.Akibatnya, hasil-hasil Sidang Umum MPRS sebagai landasan operasional, khususnya yang menyangkut ketentuan dalam pasal dua Ketetapan MPRS No.XIII/MPRS/1966, terkenal dengan Dwi Dharma Catur Karya, tidak bisa terlaksana sebagaimana mestinya.*Ibid*, hlm.403 dan 410.

²¹*Ibid*.

²²*Ibid*, hlm. 407.

Panglima keempat Angkatan untuk menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto. Rabu malam, tanggal 22 Februari 1967 di Istana Merdeka Presiden Soekarno menyerahkan seluruh kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto yang berlaku surut mulai tanggal 20 Februari 1967. Peristiwa ini menandakan penyerahan kekuasaan pemerintahan. Pemerintahan Orde Baru semakin tegak setelah dilaksanakannya Sidang Istimewa MPRS tanggal 7-12 Maret 1967. Salah satu keputusan yang terpenting ialah dengan dikeluarkannya Tap MPRS No.XXXIII/67 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto.

Memasuki era Pembangunan, peranan KAMI mulai menurun. Masalah agama di Ujung Pandang pada 1 Oktober 1967 dengan cepat meluas ke batang tubuh KAMI Pusat. Perdebatan tak kunjung usai merembet dalam Musyawarah antar agama tanggal 30 November 1967.

Eksistensi KAMI dipertanyakan. Untuk itu KAMI Pusat mengadakan sidang paripurna pada tanggal 11-13 Februari 1969 di Gedung PTIP, Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Selama sidang berlangsung, perdebatan sengit terjadi namun belum bisa mendapatkan sesuatu. Pembicaraan selalu macet hingga akhirnya IMADA dan PMB keluar dari sidang.

Keesokannya, 14 Februari 1969 Somal yang terdiri dari CSB, IMADA, IMABA, GMS dan MMB memutuskan untuk menarik diri dari keanggotaan Presidium KAMI Pusat.

KAMI Pusat semakin lumpuh. Eksistensinya semakin diragukan tatkala PMKRI keluar beberapa hari kemudian. Namun sidang paripurna ke II KAMI Pusat tetap dilanjutkan tanggal 10-11 Maret 1969 dengan memberi mandat kepada 14 orang dan 3 Dewan Mahasiswa untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional Mahasiswa Indonesia pada Juni 1969 di Jakarta. Tim diberi nama "Tim Pelaksana Munas Mahasiswa Indonesia" dan menunjuk 3 orang koordinator dan 2 orang sekretaris. Namun, tim yang diketuai oleh David Napitupulu ini tidak bisa lagi bekerja dan diambil alih oleh 3 Dewan Mahasiswa yaitu UI, IKIP dan IPB.²⁵

Musyawarah Nasional Mahasiswa Indonesia terlaksana di Bogor pada tanggal 14-15 Desember 1970. Sejak itu, nama KAMI mulai sayup-sayup terdengar dan tidak pernah mencatat peranan yang gemilang lagi.²⁶

IV. Kesimpulan

KAMI berdiri atas prakarsa menteri PTIP saat itu, Brigjen Syarif Thayib dilaksanakan pertemuan di kediamannya,

²⁵*Ibid*, hlm. 421.

²⁶*Ibid*.

Jl. Imam Bonjol 26 Jakarta pada 25 Oktober. Peman KAMI dalam jalur konseptual dengan melaksanakan Pekan Ceramah dan Seminar soal-soal Ekonomi dan Keuangan yang berlangsung 10-20 Januari 1966 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Seminar ini diselenggarakan atas kerjasama Universitas Indonesia, KAMI Pusat dan KASI (Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia). Seminar mengambil tema "Trace Baru" yang artinya jalan baru atau cara baru yang harus ditempuh untuk membangun ekonomi, politik, sosial, hukum dan pertahanan di masa depan. Seminar berhasil memperoleh kesimpulan yang dijabarkan ke dalam 5 bab yang terdiri dari 14 pasal. Jalur aksi masa dilakukan untuk menyampaikan Tritura. Sejak 10 Januari-11 Maret, mahasiswa melakukan aksi demonstrasi

Dampak KAMI dalam pergolakan politik Indonesia (1965-1970) telah dirasakan dalam kancah perpolitikan Indonesia. Salah satu isi Tritura yang menuntut perombakan Kabinet Dwikora mengawali perubahan perpolitikan nasional hingga menurunkan tahta Soekarno digantikan Presiden Soeharto. Sementara itu, tuntutan pembubaran PKI selain mempengaruhi peta perpolitikan masa Orde Baru juga secara permanen mematikan ideologi komunis. Sedangkan tuntutan yang ketiga, yaitu turunkan harga

kebutuhan pokok juga telah membantu meringankan beban perekonomian rakyat. Hal itu tidak lepas dari konsepsi hasil seminar yang dilaksanakan KAMI pada 10 Januari-20 Januari. Konsepsi tersebut juga digunakan sebagai landasan kebijaksanaan ekonomi di masa Orde Baru. Melalui ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966 tertanggal 5 Juli 1966 Dari 71 Pasal tersebut, 23 Pasal diantaranya terdapat kesamaan dengan konsep-konsep dalam hasil Ceramah dan seminar KAMI.

KAMI menandai sebuah era perjuangan yang baru. Kebangkitan nasional yang baru tersebut disadari oleh Jenderal Dr. A.H. Nasution dan diberi nama Angkatan 66 untuk menandakan suatu kebangkitan nasional yang baru setelah Angkatan 08, 28 dan 45.

Pasca turunnya Soekarno, KAMI tidak dapat mengikuti dinamika politik yang baru. Rumusan strategi perjuangan KAMI yang baru tidak dapat diimplementasikan. Permasalahan agama yang terjadi di Ujung Pandang mengawali keretakan KAMI. Sidang paripurna tidak dapat menyelesaikan permasalahan justru menyebabkan Somal dan PMKRI keluar dari KAMI. Setelah memberikan mandate kepada 14 orang dan 3 Dewan Mahasiswa dilaksanakanlah Musyawarah Nasional Mahasiswa Indonesia di Bogor pada 14-15 Desember 1970. Hasil musyawarah tidak memberikan jalan keluar, justru

menjadi akhir perjalanan KAMI. Sejak saat itu KAMI tidak pernah terdengar lagi.

V. Daftar Pustaka

a. Buku:

Achmad Suhawi. (2009). *Gymnastik Politik Nasionalis Radikal Fluktuasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Cosmas Batubara. (2007). *Cosmas Batubara, Sebuah Otobiografi Politik*. Jakarta: Gramedia.

IID. Haryo Sasongko. (2005). *Korupsi Sejarah dan Kisah Derita Akar Rumput*. Jakarta: Pusat Utan Kayu.

KAMI Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. (1984) (cet. 2). *Jalur Baru Sesudah Runtuhnya Ekonomi Terpimpin (The Leader, The Man and The Gun)*. Jakarta: Sinar Harapan.

Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Cet. V. Yogyakarta: Rentang Pustaka.

M. Alfan Alian. (2013). *IIMI 1963-1966. Menegakkan Pancasila di Tengah Prahara*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Martha, G-Ahmadduni. (1985). *Pemuda Indonesia Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*. Jakarta: Fu Sinar Bahagia.

Nasution, A.II. (1988). *Memenuhi Panggilan Tugas Jil. 6: Masa Kebangkitan Orde Baru*. Jakarta: Haji Masagung.

_____. (1975). *Dari Kup 1 Oktober 1965 ke Sidang Istimewa MPRS 1967*. Kota dan penerbit tidak dicantumkan.

Suhartono W. Pranoto. (2010). *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tim Penyusun. (2013). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan FIS UNY: Jenis Penelitian Historis, Kualitatif, Kuantitatif, dan PTK*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta

Yahya A. Muhaimin (2005) (Cet. 2). *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

b. Artikel

Parakitri Tahi Simbulon. Prisma, Desember 1977. "Di Balik Mitos Angkatan 66". Dalam Farchun Bulkin (Ed). *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

reviewer.



Dr. Dyah Kumalasari, M. Pd.
NIP. 19770618 200312 2 001

pembimbing.



Dr. Aman, M. Pd.
NIP. 19741015 200312 1 001